



## **INOVASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN STUDI KASUS PADA UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK) DALAM PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT-MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MPD) KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK**

**Daniel Teguh Kurniawan, Dzunuwanus Ghulam Manar SIP,M.Si, Dr. Kushadayani, MA**

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

(daniel\_teguh25@yahoo.co.id)

Jl. Prof. Soedarto Tembalang-Semarang,50239 Telp/Fax (024) 7460058

### **ABSTRAK**

Pada tahun 2007 muncul program pemberdayaan masyarakat yaitu PNPM-MPd (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan). Untuk melaksanakan kegiatan pada lokasi program maka dibentuklah UPK (Unit Pengelola Kegiatan) yang merupakan salah satu pelaku PNPM-MPd di tingkat Kecamatan.

Berkaitan dengan hal tersebut pada tanggal 2 Mei 2011, Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak yang difasilitasi oleh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) terpilih sebagai UPK terbaik tingkat nasional tahun 2011 dalam anugerah “SIKOMPAK Award” yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Penghargaan ini diberikan Dalam rangka memberikan apresiasi kepada pelaku pembangunan dan insan pemberdayaan masyarakat, yang dinilai terbaik secara nasional.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui inovasi yang dilaksanakan oleh UPK Kecamatan Wonosalam dalam melaksanakan PNPM-MPd. Mengingat semua pelaku memiliki pedoman umum pelaksanaan yang sama yaitu PTO (Petunjuk Teknis Operasional) PNPM-MPd. Bagaimana pelaksanaan inovasi tersebut dan siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan inovasi di UPK Kecamatan Wonosalam juga akan diungkap dalam penelitian ini, termasuk kendala-kendala yang menghambat terjadinya inovasi serta solusi yang ditempuh oleh UPK Kecamatan Wonosalam. Peran pemerintah Kabupaten Demak juga akan dilihat dari peran Tim Koordinasi PNPM-MPd Kabupaten. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus intrinsik yang merupakan salah satu model penelitian kualitatif dimana peneliti ingin mengetahui fenomena terpilihnya UPK Kecamatan Wonosalam sebagai UPK terbaik tingkat nasional dan kekhususan apa yang dimiliki oleh UPK Kecamatan Wonosalam dibandingkan dengan UPK lain yang ada di seluruh Indonesia. Dalam pengambilan narasumber dilakukan dengan cara *purposefull sampling* merupakan teknik *sampling* yang berdasarkan kepada ciri-ciri yang dimiliki oleh subjek yang dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian sehingga menghasilkan gambaran inovasi dalam pelaksanaan PNPM-MPd oleh UPK Kecamatan Wonosalam.

Hasil penelitian ini menggunakan cara *triangulasi* data yang menunjukkan bahwa terdapat dua bentuk inovasi yang terjadi di UPK Kecamatan Wonosalam yaitu pembinaan kelompok dan penekanan angka tunggakan yang merupakan hasil inisiatif dari masyarakat Kecamatan Wonosalam. Inovasi ini juga mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Demak melalui Tim Koordinasi PNPM-MPd Kabupaten Demak.

Kata kunci : Pemberdayaan, UPK, Inovasi

## **ABSTRACT**

In 2007 appeared the empowerment National Empowerment Programs Independent Rural (NEPIR). To carry out the activities at the site will be established program Unit Mangement Activities (UMA) which is one NEPIR actors at district level.

In connection with the decision on May 2, 2011, Unit Mangement Activities (UMA) Wonosalam District Demak Regency facilitated by National Empowerment Programs Independent Rural (NEPIR) was selected as the best UMA national level in 2011 in grace "SIKOMPAK Award" which organized by the Ministry of Interior of the Republic of Indonesia. The award is given in order to give appreciation to the actors of development and human empowerment, which was considered the best nationally.

This research aims to determine the innovations implemented by the UMA Wonosalam District in implementing NEPIR. Given all actors have the same general guidelines for the implementation of the OTI (Operational Technical Instructions) NEPIR. How the implementation of these innovations and anyone else involved in the implementation of innovations in UMA Wonosalam District also will be revealed in this study, including constraints that inhibit the innovation and solutions adopted by the UMA Wonosalam District. The role of Demak regency government will also be seen from the role of the Coordinating Team of NEPIR Regency. This research using methods case study intrinsic that is one model where research qualitative researcher to know the phenomenon of the election of UMA Wonosalam District as the best national and specificity of what is owned by UMA Wonosalam District compared with other existing throughout Indonesia. In taking informants conducted by purposefull sampling is a sampling technique based on the characteristics of the selected by the subject because it fits the purpose of the research so as to produce an overview of innovation in the implementation of NEPIR by UMA Wonosalam District.

The results of this study using triangulation method of data shows that there are two forms of innovation happening in the UMA District Wonosalam Distric the coaching group and the emphasis delinquency rate is the result of initiatives from the district Wonosalam. This innovation also get full support from the government through the Coordinating Team NEPIR Demak regency.

Keywords: Empowerment, UMA, Innovation

## **PENDAHULUAN**

Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk memulihkan atau meningkatkan keberdayaan suatu komunitas agar mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak – hak dan tanggung jawab mereka sebagai komunitas manusia dan warga negara. Pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu tema sentral dalam pembangunan masyarakat seharusnya diletakkan dan diorientasikan searah dan selangkah dengan paradigma baru pendekatan pembangunan. Paradigma pembangunan lama yang bersifat *top-down* perlu direorientasikan menuju pendekatan *bottom-up* yang menempatkan masyarakat atau petani di pedesaan sebagai pusat pembangunan atau oleh Chambers dalam Anholt (2001) sering dikenal dengan semboyan "*put the farmers first*". Secara sederhana, Subejo dan Supriyanto (2004) memaknai pemberdayaan masyarakat sebagai upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumberdaya lokal yang dimiliki melalui *collective action* dan *networking* sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi, dan sosial". Sedangkan dalam pengertian yang lebih luas, pemberdayaan masyarakat merupakan proses untuk memfasilitasi

dan mendorong masyarakat agar mampu menempatkan diri secara proporsional dan menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan lingkungan strategisnya untuk mencapai suatu keberlanjutan dalam jangka panjang. Menurut Nasikun (2000:27) paradigma pembangunan yang baru tersebut juga harus berprinsip bahwa pembangunan harus pertama-tama dan terutama dilakukan atas inisiatif dan dorongan kepentingan-kepentingan masyarakat, masyarakat harus diberi kesempatan untuk terlibat di dalam keseluruhan proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunannya; termasuk pemilikan serta penguasaan aset infrastrukturnya sehingga distribusi keuntungan dan manfaat akan lebih adil bagi masyarakat. Aspek penting dalam suatu program pemberdayaan masyarakat adalah program yang disusun sendiri oleh masyarakat, mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat, mendukung keterlibatan kaum miskin dan kelompok yang terpinggirkan lainnya, dibangun dari sumberdaya lokal, sensitif terhadap nilai-nilai budaya lokal, memperhatikan dampak lingkungan, tidak menciptakan ketergantungan, berbagai pihak terkait terlibat (instansi pemerintah, lembaga penelitian, perguruan tinggi, LSM, swasta dan pihak lainnya), serta dilaksanakan secara berkelanjutan.

Sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan, serta Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Guna menjamin proses pengelolaan kegiatan yang baik dan sinambung di lokasi program maka dibentuk suatu Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di setiap kecamatan, selain untuk menjamin keamanan, akuntabilitas, dan penyaluran dana dengan baik, Unit Pengelola Kegiatan (UPK) berperan dalam pendokumentasian (pencatatan dan pengarsipan) atas setiap kegiatan yang dilaksanakan di lokasi program. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) berkedudukan di kecamatan dan terbentuk dalam forum musyawarah antar desa kedua (MAD II) atau MAD Prioritas usulan kegiatan yakni, pada saat semua usulan kegiatan dari setiap desa di kecamatan tersebut, didiskusikan oleh masyarakat untuk diurutkan sesuai skala prioritas.

Berkaitan dengan hal tersebut pada tanggal 2 Mei 2011, Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak yang difasilitasi oleh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) terpilih sebagai UPK terbaik tingkat nasional tahun 2011 dalam anugerah “SIKOMPAK Award” yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Penghargaan ini diberikan Dalam rangka memberikan apresiasi kepada pelaku pembangunan dan insan pemberdayaan masyarakat, yang memiliki dedikasi dan tanggungjawab dalam memfasilitasi masyarakat di daerah, khususnya melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Terkait dengan keberadaan dan perkembangan BKAD (Badan Musyawarah Antar Desa), UPK, Pendamping Lokal, serta Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif, maka dirasa penting oleh Pemerintah untuk diberikan suatu anugerah kepada mereka yang dinilai terbaik secara nasional. Anugerah ini diharapkan dapat mendorong daerah lain untuk memacu diri, bekerja lebih keras dalam rangka mensukseskan visi, misi PNPM-MPd.

Adapun permasalahan yang hendak diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana munculnya inovasi dalam pelaksanaan PNPM-MPd oleh UPK Kecamatan Wonosalam sehingga berhasil menjadi UPK terbaik di Indonesia, Bagaimana peran Pemerintah Daerah Kabupaten Demak dilihat dari peran Tim Koordinasi PNPM-MPd Kabupaten. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab masalah yang hendak diteliti yakni untuk mengetahui inovasi apa yang ada di UPK Kecamatan Wonosalam dan bagaimana pelaksanaannya sehingga menjadi UPK

terbaik tingkat nasional dan kendala-kendala apa yang ditemui dalam pelaksanaan inovasi tersebut serta bagaimana langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi kendala-kendala yang muncul.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Penelitian ini menggunakan acuan teori inovasi yang merupakan perubahan sosial yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dan diamati sebagai sesuatu yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang (masyarakat) karena menurut teori perubahan sosial Zaltman dan Duncan (1973:7) berpendapat bahwa semua inovasi termasuk perubahan sosial, tetapi perubahan sosial belum tentu inovasi. Inovasi tidak senantiasa tertuang dalam tindakan saja inovasi dapat berupa ide atau gagasan baru untuk menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang lebih baik dari yang hanya menjalankan kegiatan sesuai dengan petunjuk umum yang ada sesuai dengan pendapat Ibrahim (1998:40) yang mendefinisikan bahwa inovasi adalah suatu ide, barang, kejadian, metode yang dirasakan atau diamati sebagai suatu hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang (masyarakat). Inovasi menjadi semakin penting karena ada hubungan yang signifikan antara tingkat inovasi dengan tingkat kinerja organisasi. Pemberdayaan masyarakat juga dapat mengalami inovasi sehingga menjadi pemberdayaan yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat karena pemberdayaan masyarakat menurut Giarci (2001) memandang *pemberdayaan masyarakat* sebagai suatu hal yang memiliki pusat perhatian dalam membantu masyarakat pada berbagai tingkatan umur untuk tumbuh dan berkembang melalui berbagai fasilitasi dan dukungan agar mereka mampu memutuskan, merencanakan dan mengambil tindakan untuk mengelola dan mengembangkan lingkungan fisiknya serta kesejahteraan sosialnya. Hal senada juga diungkapkan Subejo dan Supriyanto (2004) memaknai pemberdayaan masyarakat sebagai upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumber daya lokal yang dimiliki melalui *collective action* dan *networking* sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi, dan sosial. Pemberdayaan masyarakat perlu mendapatkan inovasi karena masyarakat sebagai pelaku utamanya harus mampu mengerti potensi wilayah mereka dan memerlukan inovasi untuk menjalankan program kegiatan tersebut karena potensi yang dimiliki daerah berbeda-beda. Inovasi mampu mendorong kegiatan potensi lokal dan menjadi solusi bagi hambatan yang, hadir Inovasi dibutuhkan manakala didalam pelaksanaan suatu kegiatan menemui hambatan hal ini sesuai dengan pendapat Inovasi merupakan upaya mengeksplorasi perubahan menjadi sebuah kesempatan bagi organisasi, atau bagaimana mengeksplorasi ide baru secara sukses ([http://pusdiklatwas.Bpkp.go.id/artikel/namafile/49/Manajemen\\_Inovasi\\_pada\\_Pusdiklatwas\\_BPKP.pdf](http://pusdiklatwas.Bpkp.go.id/artikel/namafile/49/Manajemen_Inovasi_pada_Pusdiklatwas_BPKP.pdf) ).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan menggunakan model studi kasus intrinsik. Studi atas kasus dilakukan karena alasan peneliti mengetahui secara intrinsik suatu fenomena terpilihnya Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Kecamatan Wonosalam sebagai Unit Pengelola Kegiatan (UPK) terbaik tingkat nasional, faktor- faktor apa saja yang mendukung

keberhasilan tersebut dan kekhususan apa yang dimiliki oleh UPK Kecamatan Wonosalam dibandingkan dengan UPK lain yang ada di seluruh Indonesia sehingga UPK Kecamatan Wonosalam dapat menjadi yang terbaik tingkat Nasional. Dimana yang menjadi subyek penelitian adalah UPK Kecamatan Wonosalam, pemerintah daerah, serta masyarakat Kecamatan Wonosalam. Situs penelitian berkaitan dengan tempat atau wilayah dimana penelitian akan dilaksanakan. Adapun yang menjadi wilayah penelitian adalah Kecamatan Wonosalam yang terdiri atas 21 desa yang melaksanakan PNPM-MPD.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu wawancara mendalam dengan informan sebagai teknik utamanya, kemudian peneliti juga menggunakan teknik observasi yang artinya bahwa peneliti mengikuti setiap prosesi yang ada dalam kegiatan UPK Kecamatan Wonosalam untuk memberdayakan masyarakat melalui PNPM-MPD. sebagai penunjang, peneliti juga menggunakan teknik dokumentasi untuk mendapat data-data tertulis yang dianggap relevan dengan penelitian ini.

Data yang telah terkumpul akan dianalisis dengan pendekatan kualitatif sebagaimana yang diutarakan oleh Miles dan Huberman (2007), yaitu Reduksi data yang dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dari lapangan. Reduksi data berlangsung secara terus menerus sejalan pelaksanaan penelitian berlangsung, kemudian diikuti dengan Penyajian data yaitu pemaparan data yang telah diperoleh, sebagai persiapan untuk melakukan analisis dan kemudian pada akhirnya melakukan penyimpulan data. Penarikan kesimpulan/verifikasi Pada tahap ini dimaknai sebagai penarikan arti dari data yang telah ditampilkan. Pemberian makna ini tentu saja sejauh pemahaman peneliti dan interpretasi yang akan dibuat. Beberapa cara yang dilakukan dalam tahap ini adalah dengan melakukan pencatatan untuk pola-pola dan tema yang sama, pengelompokkan, pencarian kasus-kasus negatif (kasus khas, berbeda, mungkin pula menyimpang dari kebiasaan yang ada di masyarakat.)

## **PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

Inovasi adalah suatu ide-ide, hal-hal yang bersifat praktis, metode, cara, barang ciptaan manusia yang diamati atau dirasakan sebagai sesuatu yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang (masyarakat). Seperti halnya inovasi yang juga dilaksanakan di UPK Kecamatan Wonosalam dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPD) yang dapat berupa suatu ide-ide, metode, atau barang baru yang dilaksanakan oleh UPK Kecamatan Wonosalam

Di Kecamatan Wonosalam memiliki dua bentuk inovasi yang dilaksanakan oleh UPK Kecamatan Wonosalam. Kedua bentuk inovasi ini lahir dari musyawarah antar desa yang dilaksanakan di setiap bulan untuk membahas jalannya kegiatan PNPM-MPD di masing-masing desa. Dari musyawarah tersebut munculah permasalahan yang hampir sama di setiap desa yaitu besarnya angka tunggakan oleh peminjam dana bergulir. Karena pemanfaat merupakan anggota kelompok maka perlu diadakan suatu terobosan untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu pembinaan kelompok dan penekanan angka tunggakan. Pembinaan kelompok dan penekanan angka tunggakan mendapatkan perhatian serius di Kecamatan Wonosalam karena jika dana perguliran berhenti ataupun macet di setiap kelompok dan angka tunggakan tinggi maka desa wilayah program nantinya akan mendapatkan sanksi dari pemerintah. Sehingga kedua langkah tersebut tentu membutuhkan peran semua pihak dari pelaku tingkat desa sampai pelaku tingkat kabupaten. Berikut dibahas mengenai kedua bentuk inovasi tersebut yaitu :

*Pertama* adalah pembinaan kelompok, masyarakat dibagi menjadi dua jenis yaitu Kelompok Simpan Pinjam (KSP) yang merupakan kelompok yang mempunyai kegiatan pengelolaan simpanan dan pinjaman dan Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang merupakan kelompok yang mempunyai kegiatan usaha bersama yang dikelola secara bersama oleh anggota kelompok. Tentunya kedua jenis kelompok tersebut harus memiliki prioritas anggota rumah tangga miskin. Kelompok merupakan pemanfaat pinjaman dana bergulir dari PNPM-MPd karena dengan adanya kelompok maka dana yang terserap akan lebih nyata manfaatnya bagi masyarakat, terutama bagi rumah tangga miskin, dengan kelompok mereka akan sangat terbantu dalam permodalan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya namun pinjaman yang dikucurkan kepada kelompok akan percuma jika kelompok hanya dibiarkan saja menerima dana pinjaman tersebut tanpa tau apa yang selanjutnya mereka perbuat, terutama bagi rumah tangga miskin yang memiliki sumber daya manusia yang rendah. Jika dibiarkan akan berdampak kepada besarnya tunggakan karena kelompok tidak mampu mengembalikan pinjaman tersebut. Untuk itulah kelompok perlu dibina misalnya mulai dari tahap perencanaan usaha apa yang dibangun kelompok sesuai dengan potensi desanya, berapa dana yang dibutuhkan masing-masing kelompok, dan dimana atau kemana kelompok-kelompok tersebut dapat memasarkan produk yang mereka hasilkan.

Dalam melaksanakan pembinaan kelompok UPK Kecamatan Wonosalam tetap mengacu pada PTO (Petunjuk Teknis Operasional) PNPM-MPd dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Tahap perencanaan

Di Kecamatan Wonosalam perencanaan dimulai dari tingkat desa dengan mengadirkan seluruh elemen masyarakat. Tentu hal ini sangat berguna untuk dapat mengetahui permasalahan-permasalahan apa saja yang ada di masyarakat terutama penyebab terjadinya rumah tangga miskin. Setelah itu diadakan pemetaan dimana saja terdapat rumah tangga miskin untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang penyebaran rumah tangga miskin sehingga kegiatan yang akan dilaksanakan dapat tepat sasaran. Selain itu kaum perempuan juga mengambil andil yang besar untuk penetapan usulan kegiatan di desanya melalui musyawarah khusus perempuan. Sehingga semua usulan dari semua unsur baik laki-laki maupun perempuan dapat ditampung menjadi satu yang kemudian dapat disusulkan untuk penetapan kegiatan di desa.

2. Verifikasi oleh Tim Verifikasi

Dalam pelaksanaan verifikasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), baik itu dalam pengajuan program dari kelompok, atau simpan pinjam terdapat beberapa indikasi penipuan yang telah ditemukan oleh Tim Verifikasi Kecamatan Wonosalam, Kebohongan oleh oknum anggota kelompok yang bertindak dengan tidak bertanggung jawab ini dapat mengakibatkan dana pinjaman bergulir yang dikelola oleh UPK Kecamatan Wonosalam tidak tepat sasaran dan dana tersebut akan hilang secara percuma. untuk menghindari penyelewengan dana yang pinjaman Pemberlakuan Kartu Tanda Anggota (KTA) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Wonosalam terhadap masyarakat Kecamatan Wonosalam. Pemberlakuan Kartu ini sebagai upaya untuk meminimalkan penyelewengan yang dilakukan masyarakat. Melalui Kartu Tanda Anggota (KTA) ini masyarakat akan mudah untuk di kontrol dan dipercaya, karena dilakukan verifikasi terlebih dahulu.

3. Keputusan Pendanaan

Setelah kelompok lolos verifikasi maka akan memperoleh dana pinjaman dana bergulir dari PNPM-MPd yang disalurkan oleh UPK Kecamatan Wonosalam.

4. Pembinaan kelompok

UPK Kecamatan Wonosalam yang berkerjasama dengan fasilitator kabupaten untuk dapat memfasilitasi antara kelompok binaan UPK dengan lembaga-lembaga terkait untuk mendukung berkembangnya kelompok binaan tersebut. Peran fasilitator Kabupaten di Kecamatan Wonosalam dimulai dari mengajarkan dan mengarahkan UPK tentang cara mencari mitra/*channeling* sehingga sampai sekarang UPK sudah mempunyai beberapa mitra yang sudah bekerjasama dengan UPK antara lain :

- 1) Secara Internal diantara adalah :  
Dengan melibatkan kelembagaan yang ada sebagai *market building* ( pengembangan jaringan pemasaran ) atas potensi atau kegiatan ekonomi yang sudah ada.misalnya : Peternak angasa dari desa A diproduksi bulunya di desa B.
- 2) Secara Eksternal diantaranya adalah :  
Mampu memfasilitasi UPK kecamatan Wonosalam untuk menjalin kerjasama dengan CV. Dampu Awang Lawatan, Kabupaten Tegal sebagai : Instruktur kegiatan pelatihan, Hak penggunaan merk dan pemasarannya, Pembinaan kualitas produk *shuttlecock*.
  - a) Mampu memfasilitasi UPK Kecamatan Wonosalam untuk menjalin kerjasama dengan LPK Bina Siswa, LPK Cipta Abadi, LPK Tunas Bangsa sebagai : Instruktur kegiatan pelatihan, Penyaluran tenaga kerja, dan Pembinaan kelompok menjahit usaha mandiri.
  - b) Mampu memfasilitasi UPK Kecamatan Wonosalam untuk menjalin kerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab Demak.
  - c) Mampu memfasilitasi UPK kecamatan Wonosalam untuk menjalin kerjasama dengan Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Propinsi Jateng.

*Kedua*, hal yang menjadi pembeda UPK Kecamatan Wonosalam dibandingkan dari UPK lainnya diseluruh indonesia adalah rendahnya angka tunggakan peminjam atau kelompok pemanfaat di wilayah Kecamatan Wonosalam. Hal yang mendorong terjadinya penekanan tunggakan adalah dukungan dari pemerintah Kabupaten Demak sendiri yang merupakan kebijakan yang hanya ada di Kabupaten Demak yaitu kebijakan tentang memberikan penghargaan kepada UPK yang berhasil menekan angka tunggakan dibawah 3%. UPK Kecamatan Wonosalam sendiri telah menjadi yang terbaik tingkat kabupaten selama empat tahun berturut-turut dengan rincian sebagai berikut :

- Tahun 2007 Rp. 100.000.000,-
- Tahun 2008 Rp. 100.000.000,-
- Tahun 2009 Rp. 100.000.000,-
- Tahun 2010 Rp. 125.000.000,-

Dana yang digunakan untuk *reward* kepada UPK berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) kabupaten Demak. *Reward* ini diberikan dengan tujuan untuk menambah semangat para pelaku Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd). Dari hal tersebut UPK Kecamatan Wonosalam melakukan beberapa langkah mengurangi tunggakan yang diantaranya adalah :

#### 1. Kompetisi Tingkat Kecamatan

Di Kecamatan Wonosalam juga diadakan kompetisi antar desa, kompetisi ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja masing-masing desa dalam pelaksanaan Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP) di desanya. Syarat mengikuti kompetisi ini adalah desa tersebut tidak memiliki tunggakan atau batas tunggakan yang telah disepakati bersama.

2. Sanksi Sosial

Sanksi lokal ini dilakukan ketika ada desa yang mengalami tunggakan pinjaman dan sulit untuk mengembalikan pinjaman tersebut. Hal ini dilakukan guna menekan tingkat penyelewengan dan tunggakan yang ada di Kecamatan Wonosalam kaitannya dalam Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Masyarakat Kecamatan Wonosalam yang memutuskan adanya sanksi lokal ini disaat MAD pada tahun 2009 dimana pada saat itu terjadi tunggakan yang besar di beberapa desa karena terjadi kegagalan panen, karena itu untuk menghargai kerja keras desa-desa yang telah menyelesaikan tunggakannya agar tidak terjadi kesenjangan diantara desa-desa di Kecamatan Wonosalam.

3. Identifikasi masalah tunggakan

Identifikasi masalah tunggakan ini merupakan salah satu terobosan UPK Kecamatan Wonosalam untuk menekan angka tunggakan yang ada di desa. Dibawah arahan langsung dari fasilitator kabupaten dalam rapat koordinasi yang diadakan setiap bulan, maka strategi identifikasi masalah tunggakan dijalankan oleh UPK Kecamatan Wonosalam. Dengan melakukan identifikasi masalah langsung kepada penerima manfaat maka UPK Kecamatan Wonosalam akan mengetahui masalah yang sebenarnya menyebabkan tunggakan itu terjadi dan dapat menentukan strategi apa selanjutnya untuk mengatasi tunggakan yang terjadi.

Hambatan Terjadinya Ide Baru Yang Dihasilkan Oleh UPK Kecamatan Wonosalam.

Hambatan yang muncul Di dalam Pelaksanakan ide-ide baru UPK Kecamatan Wonosalam antara lain adalah :

1. UPK Kecamatan dihadapkan pada masalah keterbatasan sumber daya manusia yang ada karena didalam UPK Kecamatan Wonosalam hanya ada satu bendahara dan satu sekretaris saja sehingga kinerja dalam pengadministrasian dirasa kurang maksimal.
2. Persepsi masyarakat setiap ada program dari pemerintah adalah bahwa program tersebut adalah bantuan dari pemerintah dan dana yang digunakan harus dihabiskan. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) ini harus digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dan dana bergulir dimasyarakat harus dikembalikan. Untuk itulah diperlukan adanya penyadaran kepada masyarakat dan sosialisasi yang jelas.
3. Meskipun masyarakat Kecamatan Wonosalam mampu mengalami tiga kali masa periode panen namun kegagalan panen sering tidak dapat dihindari karena masalah hama yang menyerang tanaman mereka. Masalah juga timbul ketika hasil usaha yang dirintis oleh masyarakat mengalami penurunan atau mengalami kegagalan.
4. Resiko ini ada karena segmen pasar dari pinjaman bergulir ini adalah orang miskin yang tidak menggunakan agunan. Sehingga modal dasar yang digunakan adalah kepercayaan antara peminjam dengan UPK.
5. Belum terciptanya suatu sistem yang menjamin kelestarian inovasi di UPK Kecamatan Wonosalam, jika para pelaku yang terlibat dalam inovasi di Kecamatan Wonosalam berganti jabatan belum tentu inovasi yang ada dapat terus dijalankan karena terdapat perbedaan persepsi untuk pelaksanaan inovasi sehingga inovasi di Kecamatan Wonosalam terancam terhenti.

Solusi Bagi Hambatan Terjadinya Ide Baru Yang Dihasilkan Oleh UPK Kecamatan Wonosalam.

1. Di Kecamatan Wonosalam diantara para pelaku PNPM-MPd di tingkat kecamatan serta desa sehingga setiap ada masalah atau perkembangan kegiatan program maka akan langsung dibahas di setiap forum rapat yang tersedia. jika tidak dapat diselesaikan di forum rapat maka jalan yang ditempuh oleh UPK Kecamatan Wonosalam adalah dengan melakukan



penyelesaian secara intern dan mencari terobosan baru penyelesaian masalah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh UPK Kecamatan Wonosalam misalnya terhadap kelompok yang ada tunggakan.

2. Untuk menjamin kualitas pelaksanaan kegiatan yang tetap mengacu pada prinsip dan mekanisme Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP), maka perlu adanya persiapan yang matang dan terencana. Persiapan pelaksanaan ini lebih ditujukan kepada penyiapan aspek sumber daya manusia, termasuk masyarakat, Tim Pengelola Kegiatan (TPK), Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan seluruh pelaku Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) lainnya. Karena itu, Tim Pelaku Kegiatan (TPK), Unit Pengelola Kegiatan (UPK) perlu mendapatkan pelatihan terlebih dahulu sebelum melaksanakan kegiatan yang didanai Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP). Pelatihan Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan (BP UPK), Tim Pengelola Kegiatan (TPK), dan pelaku desa lainnya dilakukan dalam masa setelah pendatangan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) oleh Camat, sampai dengan masa persiapan pelaksanaan.

#### **Peran Tim Koordinasi PNPM-Mpd Kabupaten Demak**

Bentuk peran tim koordinasi PNPM-Mpd Kabupaten Demak terhadap suksesnya program PNPM-MPd adalah dengan mengadakan rapat koordinasi dengan seluruh pelaku PNPM-MPd di Kabupaten Demak setiap bulan sekali untuk dapat memonitoring sejauh mana progress kegiatan PNPM-MPd berjalan di semua kecamatan, mendiskusikan masalah-masalah yang ada di setiap kecamatan dan juga membahas hal-hal lain yang menyangkut keberlangsungan kegiatan PNPM-MPd di Kabupaten Demak. Disamping itu dengan adanya rapat koordinasi setiap bulan oleh seluruh perwakilan pelaku PNPM-MPd yang ada di Kabupaten Demak dapat menselaraskan kegiatan PNPM-MPd yang ada di seluruh Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Demak. Dari tabel di atas juga dapat diketahui Tim koordinasi PNPM-MPd mampu melihat sejauh mana hasil kegiatan PNPM-MPd di setiap kecamatan, permasalahan dan hambatan yang ditemui, lalu kemudian secara bersama-sama membahas strategi apa yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut maupun untuk mengatasi permasalahan dan hambatan yang ada.

## **Penutup**

### **A. Kesimpulan**

Dari hasil uraian dan pembahasan mengenai adanya inovasi di UPK Kecamatan Wonosalam dalam pelaksanaan PNPM-MPd (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat –Mandiri Perdesaan) maka dapat diambil tiga kesimpulan sebagai berikut:

1. Inovasi memang ada dan berlangsung di UPK Kecamatan Wonosalam dalam pelaksanaan PNPM-MPd (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat –Mandiri Perdesaan). Inovasi tersebut terdiri dari dua bentuk yaitu pembinaan kelompok dan penekanan angka tunggakan.
2. Kedua bentuk inovasi tersebut merupakan hasil inisiatif dari masyarakat Kecamatan Wonosalam yang difasilitasi melalui proses MAD (Musyawarah Antar Desa). Kedua bentuk inovasi ini dilaksanakan dengan tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam PTO PNPM-MPd. Sehingga menghindarkan UPK Kecamatan Wonosalam dari sanksi yang berlaku.

3. Peran Pemerintah Kabupaten Demak terlihat nyata melalui Tim Koordinasi PNPM-MPd Kabupaten Demak yang memfasilitasi setiap kegiatan PNPM-MPd di Kabupaten Demak.

#### **B. Saran**

Dalam inovasi UPK Kecamatan Wonosalam masih memerlukan beberapa masukan untuk menambah lebih baik lagi pelaksanaan inovasi di Kecamatan Wonosalam, yang diantaranya adalah :

1. Perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia anggota UPK Kecamatan Wonosalam melalui pelatihan pembuatan laporan keuangan agar laporan-laporan keuangan UPK kecamatan Wonosalam dapat disusun dan terstruktur dengan baik.
2. Pemerintah perlu mengeluarkan regulasi untuk membentuk badan hukum UPK, agar masyarakat lebih mempercayai kinerja UPK.
3. UPK dapat memberikan *reward* kepada kelompok pemanfaat yang berprestasi berupatambahan modal kerja. *Reward* ini diharapkan dapat memberikan motivasi kepada kelompok pemanfaat lainnya agar dapat berprestasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- DR.H.M Safi'I M.si. (2008), *Paradigma Baru Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Averroes Press,Malang.
- DR. Sunyoto Usman. (2010) *Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat*. Pustaka Pelajar,Yogyakarta.
- Edi Suharto, Ph.D. (2010) *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. PT Rafika Aditama. Bandung
- Haris Herdiansyah, Msi (2010), *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sasia*/.Salemba Humanika,Jakarta Selatan.
- Prof. DR.Lexy J. Moeleong,MA (2007) PT. Metode Penellitian Kualitatif edisi revisi. Remaja Rosdakarya Bandung.
- Laporan Kinerja PNPM MP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011.
- Laporan Kinerja PNPM Mandiri Perdesaan Dalam Rangka Anugerah Pemberdayaa tahun 2011 oleh PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- Laporan Fasilitator Kabupaten Demak Bulan Agustus 2011
- PTO (Petunjuk Teknis Operasional) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd)
- Profil unit pengelola kegiatan Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Tahun 2011
- Subejo dan Supriyanto (2004) dalam [http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR. PEND. LUAR SEKOLAH/195207251978031-ACE SURYADI/09PemberdayaanMasyarakat.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR.%20PEND.%20LUAR%20SEKOLAH/195207251978031-ACE%20SURYADI/09PemberdayaanMasyarakat.pdf) diunduh pada tanggal 12 desember 2011 pukul 17.00 WIB
- UPK Wonosalam Demak Juara Nasional dalam [http://demakkab.go. id/](http://demakkab.go.id/) diunduh pada tanggal 26 September pukul 13.00 WIB.
- Sekilas tentang unit pengelola kegitan dalam <http://www.ppm-perdesaan.or.id> diunduh pada tanggal 07 oktober pukul 15.00 WIB
- [http://www.Smeru.or.id/report/training/menjembatani penelitian dan kebijakan/untukc so/file/116.pdf](http://www.Smeru.or.id/report/training/menjembatani%20penelitian%20dan%20kebijakan/untuk%20so/file/116.pdf) di unduh pada tanggal 16 januari 2012 pukul 19.30 WIB
- SIKOMPAK AWARD dalam [http://www.pnpmperdesaan.or.id/downloads/KA%20DIVISI%20PENGEMBANG AN%20PROGRAM.pdf](http://www.pnpmperdesaan.or.id/downloads/KA%20DIVISI%20PENGEMBANGAN%20PROGRAM.pdf) diunduh pada tanggal 8 maret 2012 pukul 23.00 WIB

